

ANALISIS PERTUMBUHAN BELANJA SEKTOR PENDIDIKAN TERHADAP CAPAIAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI SULAWESI SELATAN

Basri Bado

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar

Email : basribado74@gmail.com

Sitti Hasbiah

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar

Email : hasbiahsitti@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini fokus untuk menganalisis permasalahan indikator Kinerja Pendidikan di Sulawesi Selatan yang diproksi menggunakan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan pengaruh pertumbuhan belanja sektor pendidikan terhadap peningkatan kinerja sektor pendidikan di Sulawesi Selatan. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model persamaan panel data. Sumber data menggunakan data sekunder dengan unit analisis sebanyak 23 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dengan waktu 10 tahun terakhir (2003-2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pertumbuhan jumlah belanja sektor pendidikan selama 10 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan atau rata-rata pertumbuhannya mencapai 4 %-5 % pertahun; 2) Pertumbuhan capaian kinerja pendidikan yang diproksi dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Sulawesi Selatan selama 10 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Namun pertumbuhannya hanya mencapai 2 %-3 % pada setiap Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Capaian kinerja pendidikan pada Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) tersebut baru mencapai 7.6 tahun atau pada tingkatan kelas 2 SMP; 3) Peningkatan porsi belanja sektor pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan capaian kinerja pendidikan yang diproksi dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).

Kata Kunci : Belanja Pendidikan, Rata-Rata Lama Sekolah, Persamaan Simultan

ANALYSIS OF GROWTH OF EDUCATIONAL SECTOR CONSUMPTION ON AVERAGE SCHOOL DURATION IN SOUTH SULAWESI

Basri Bado

Faculty of Economics, State University of Makassar

Email : basribado74@gmail.com

Sitti Hasbiah

Faculty of Economics, State University of Makassar

Email : hasbiahsitti@yahoo.com

ABSTRACT

The objectives of this study were to analyze the problems of Education Performance Indicators in South Sulawesi proportioned using the Average School Duration (ASD) and the effect of growth in education sector spending on improving education sector performance in South Sulawesi. The method in this research using quantitative approach with equation model of panel data. The data source uses secondary data with the analysis unit of 23 regencies/cities in South Sulawesi with the last 10 years (2003-2014). The results showed that: 1) Growth of education sector expenditure during the last 10 years experienced a significant increase or average growth reached 4 %-5 % per

year; 2) Growth of educational performance capain proxy with Average School Duration (ASD) in South Sulawesi during the last 10 years continues to increase. However, growth only reaches 2 %-3 % in every regency/city in South Sulawesi. Achievement of education performance on the Average School Duration (ASD) is only reached 7.6 years or at grade 2 of junior high; 3) Increasing the share of education spending has a significant effect on the improvement of educational performance performance proxied with Average School Duration (ASD).

Key Words : Education Expenditure, Average School Duration, Simultaneous Equations

PENDAHULUAN

Beberapa hasil kajian atau penelitian telah menemukan adanya keterkaitan yang signifikan antara pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dengan capaian tingkat pendidikan. Salah satu hasil studi empirik tersebut dikemukakan oleh Gupta (2002), bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan berbanding lurus dengan akses pendidikan maupun peningkatan peserta didik.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003. Dalam UU tersebut pada intinya pemerintah menekankan bahwa semua warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan; pemerintah wajib untuk membiayai pendidikan dasar tanpa biaya; dan pemerintah diberi mandat untuk mengalokasikan anggaran minimal 20 % dari pengeluarannya untuk pendidikan.

Wujud nyata dari regulasi tersebut merupakan komitmen pemerintah untuk menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Tidak hanya itu, berbagai regulasi tentang pelaksanaan pendidikan juga dikembangkan dimulai dengan standarisasi dalam konten pendidikan pada seluruh jenjang dan jenis pendidikan, standarisasi pengelolaan pendidikan, proses pembelajaran sarana dan pembiayaan, pendidikan dan tenaga kependidikan, dan bahkan sampai pada standar penilaian.

Sejak tahun 1990an sampai sekarang anggaran sector pendidikan Indonesia mengalami fluktuasi meskipun trend pertumbuhannya mengalami peningkatan. Pengeluaran untuk sector pendidikan di tingkat nasional mencapai puncaknya pada 2003, ketika pengeluaran pendidikan mencapai sekitar 16 persen dari seluruh pengeluaran di tingkat nasional. Pada tahun 2004, total pengeluaran nasional meningkat sekitar 4 persen. Akan tetapi, proporsi pengeluaran untuk sector pendidikan menurun menjadi sekitar 14 persen. Pengeluaran untuk sector pendidikan sebagai proporsi dari PDB juga menurun pada tahun 2004 jika dibandingkan dengan pengeluaran pada tahun 2003, dari sekitar 3.2 persen menjadi sekitar 2.8 persen, sebagaimana proporsi pengeluaran secara keseluruhan di tingkat nasional terhadap PDB yang telah turun dari 19.8 persen menjadi 19.6 persen (Kajian Pengeluaran Publik, World Bank 2013).

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki proporsi belanja untuk sektor pendidikan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan secara signifikan. Peningkatan belanja sektor pendidikan di Sulawesi Selatan tersebut dalam kurun waktu 10 tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat pesat. Kebijakan politik pemerintah daerah serta pertumbuhan ekonomi yang setiap tahun mengalami peningkatan menjadi salah satu faktor pendukung merealisasikan kenaikan anggaran sektor pendidikan tersebut. Secara riil, proporsi belanja sektor pendidikan terhadap total belanja daerah di Sulawesi Selatan telah mencapai di atas 20 persen dengan kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, proporsi belanja pendidikan terhadap total belanja daerah sudah

mencapai 31 persen, padahal tahun 2005 baru mencapai 21 persen. Belanja sektor pendidikan yang meningkat lebih cepat dibandingkan dengan total belanja daerah menyebabkan proporsi belanja sektor pendidikan terhadap total belanja daerah terus membesar. Pada tahun 2005, total belanja riil sektor pendidikan sebesar Rp. 1,7 triliun dan meningkat menjadi Rp. 5,0 triliun pada tahun 2011. Belanja pendidikan kabupaten/kota berkontribusi besar bagi peningkatan total belanja pendidikan di Sulawesi Selatan. Secara riil, belanja pendidikan Kabupaten/Kota meningkat rata-rata 34 persen per tahun, sedangkan belanja pendidikan provinsi hanya meningkat 5 persen per tahun

Peningkatan belanja sektor pendidikan di Sulawesi Selatan telah berhasil mendorong output luaran terutama rasio guru-murid, tetapi belum berhasil mendorong *outcome* pendidikan. *Outcome* pendidikan tersebut berupa angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah berkontribusi terhadap rendahnya tingkat pendidikan pekerja yang masih mencapai 46,76 % dengan tingkat pendidikan $\leq$ Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal tersebut menjadi perhatian yang serius dan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

Mengingat pentingnya pembangunan manusia di sektor pendidikan yang akan berdampak pada pembangunan sosial ekonomi lainnya, maka penelitian ini akan fokus untuk mengkaji masalah kebijakan pemerintah dalam pembiayaan sektor pendidikan kaitannya dengan peningkatan rata-rata lama sekolah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.

Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. bagaimanakah gambaran indikator kinerja pendidikan di Sulawesi Selatan?
2. Apakah pertumbuhan belanja sektor pendidikan berpengaruh terhadap peningkatan indikator kinerja pendidikan di Sulawesi Selatan?

KAJIAN PUSTAKA

Teori Pengeluaran Pemerintah (Spending Expenditure)

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa :

$$Y = C + I + G + X - M$$

Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional, sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variable G menyatakan pengeluaran pemerintah (*government expenditures*), I = *investment* dan X - M = adalah net ekspor. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamatinnya dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan permintaan agregat atau pendapatan nasional. Dengan ini, dapat dianalisis seberapa penting peranan pemerintah dalam perekonomian nasional.

Peran pemerintah dalam kegiatan perekonomian diantaranya melakukan pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan, bukan hanya dalam bidang pemerintahan akan tetapi juga membiayai kegiatan perekonomian. Musgrave & Musgrave (1989), Ananda (2002) dan Reksohadiprodjo (2009) dalam Archam (2012), menyebutkan dalam perekonomian modern, ada beberapa peranan pemerintah, yaitu :

1. Peran alokatif, yakni peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi.

2. Peran distributif, yakni peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar.
3. Peran stabilitatif, yakni peran pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan *disequilibrium*.
4. Peran dinamisatif, yakni peran pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

Berkaitan dengan itu, maka pemerintah memiliki peran penting baik langsung ataupun tidak langsung dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, atau setidaknya kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan dalam jangka panjang melalui tiga instrumen fiskal yaitu pajak, pengeluaran pemerintah dan keseimbangan anggaran atau permintaan agregat. Ketiga instrumen fiskal tersebut berpengaruh pada tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (*efficiency of resources*), akumulasi faktor produksi (*production factor accumulation*) dan perkembangan teknologi (*technology progress*).

Dalam kondisi perekonomian yang lesu, pengeluaran pemerintah dapat memberi stimulasi kepada perekonomian untuk bertumbuh melalui kebijakan fiskal yang ekspansif melalui peningkatan pengeluaran pemerintah (G) atau menurunkan pajak (T) untuk meningkatkan permintaan agregat (AD) di dalam perekonomian menyebabkan pendapatan naik yang akan mengurangi pengangguran yang ada untuk mencapai tingkat pendapatan kesempatan kerja penuh (*full employment level of income*). Sebaliknya dalam kondisi *overhating* akibat terlalu tingginya permintaan agregat, kebijakan fiskal dapat berperan melalui kebijakan yang kontraktif melalui penurunan pengeluaran pemerintah (G) atau peningkatan pendapatan pajak (T) untuk menyeimbangkan kondisi permintaan dan penyediaan sumber-sumber perekonomian.

Pengeluaran pemerintah (*government spending*) yang bersifat ekspansif maupun kontraktif menggambarkan usaha pemerintah untuk menggerakkan perekonomian melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan (*revenue*) dan pengeluaran (*expenditure*) pemerintah. Archam (2012) mengemukakan dalam manajemen ekonomi modern kebijakan fiskal mengandung tiga tujuan utama yaitu :

1. Mempengaruhi alokasi sumber-sumber ekonomi untuk sektor publik dan *opportunity cost* pengalihan sumber-sumber ekonomi dari pengusaha pihak swasta.
2. Melakukan proses redistribusi kekayaan dan pendapatan antar golongan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini kebijaksanaan fiskal bertujuan untuk memperoleh keseimbangan antar individu dalam pendapatan bersih atau kesejahteraan.
3. Menentukan arah pertumbuhan dan kestabilan ekonomi nasional. Oleh karena itu kebijaksanaan fiskal harus mampu merencanakan tindakan-tindakan yang akan melancarkan pemanfaatan secara optimal sumber daya seperti sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber keuangan.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya menyangkut pengeluaran, tetapi juga memikirkan masalah kendala anggaran, yang berarti terkait dengan pembiayaan. Kendala anggaran pemerintah yakni pengeluaran terhadap barang dan jasa harus lebih kecil atau sama dengan kekayaan awal. Jika lebih besar dari itu, maka akan menimbulkan resiko defisit anggaran. Hal ini sejalan dengan Romer (2006), bahwa kebijakan fiskal tidak hanya berkaitan dengan pengalokasian dan pengaturan proporsi pengeluaran, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah membiayai pengeluaran tersebut. Setidaknya ada empat sumber pembiayaan pengeluaran pemerintah yaitu pajak, pinjaman atau penjualan obligasi, pencetakan uang (*seignorage*) dan penjualan aset pemerintah (*privatisasi*).

Menurut Barro (2001), salah satu potensi pendapatan yang tersedia bagi pemerintah untuk membiayai segala usaha pembangunan adalah penggalakan pajak. Peranan pajak dalam kebijakan fiskal begitu besar yang merupakan sumber penerimaan utama atau biasa disebut fungsi budgetair. Selain itu pajak juga digunakan sebagai fungsi regular (mengatur). Fungsi budgetair (penerimaan) yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Fungsi regular (mengatur), pajak di samping berfungsi mengisi ke kas negara, juga berfungsi untuk mengatur sebagai usaha pemerintah untuk turut campur dalam segala bidang guna tercapainya tujuan-tujuan pemerintah. Sekaitan dengan itu, Rosen (2008) mengemukakan bahwa pajak (*tax*) merupakan sumber pembiayaan utama pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengenaan jenis pajak tertentu akan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah mengenakan pajak *lump-sum* kepada masyarakat maka pengaruhnya terhadap investasi dan pertumbuhan bersifat positif, tetapi jika pajak yang dikenakan adalah pajak pendapatan, maka akan dapat menurunkan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, pembiayaan pengeluaran pemerintah melalui pinjaman atau penjualan obligasi pemerintah akan menambah kekayaan dan pendapatan masyarakat di masa yang akan datang (*long run*), namun masyarakat juga memiliki tanggungjawab dimasa datang berupa pajak obligasi. Pembiayaan melalui utang pada prinsipnya sama dengan membiayai pengeluaran melalui pungutan pajak karena utang ekuivalen dengan pajak dimasa yang akan datang.

Lain halnya dengan pembiayaan pengeluaran pemerintah melalui pencetakan uang (*seignorage*) cenderung untuk dihindari, karena adanya *growth money* sebagai dampak dari *seignorage* akan menimbulkan inflasi. Meskipun dipahami bahwa ada banyak sumber potensial terjadinya inflasi, akan tetapi pemahaman inflasi pada horizon jangka panjang umumnya dapat disimpulkan bahwa *money growth* memainkan peranan penting dalam menentukan inflasi, bukan karena uang mempengaruhi harga secara langsung, melainkan karena secara empiris bervariasi lebih dibandingkan terminan (Romer, 2006).

Kaitan antara inflasi dan *money growth* dapat diformulasikan dalam bentuk persamaan sebagai berikut :

$$\frac{M}{P} = L(iY)$$

$$P = \frac{M}{L(i, Y)} L(iY)$$

Persamaan pertama menunjukkan kondisi keseimbangan pasar uang, dimana M adalah *money stock* dan P adalah level harga, sehingga berakibat pada bentuk persamaan kedua. Persamaan kedua menunjukkan bahwa ada banyak potensi terjadinya inflasi, P dapat meningkat sebagai bertambahnya suplai uang, tingkat suku bunga, penurunan output atau berkurangnya permintaan uang untuk *i* dan *Y* tertentu.

Sedangkan berkaitan dengan privatisasi dilakukan dengan berbagai pertimbangan salah satu diantaranya mengurangi beban keuangan pemerintah, sekaligus membantu sumber pendanaan pemerintah (divestasi). Akan tetapi sumber pembiayaan pengeluaran pemerintah dari privatisasi relatif jarang digunakan, terkecuali terjadi krisis fiskal. Karena itu privatisasi yang dijalankan dibanyak negara, idealnya untuk tujuan peningkatan efisiensi pengelolaan perusahaan, serta peningkatan profesionalitas.

Pengeluaran pemerintah itu sendiri terdiri dari dua bentuk, yaitu pengeluaran rutin (*current expenditure*) dan pengeluaran untuk belanja barang dan modal (*capital expenditure*). Pengeluaran rutin untuk kegiatan-kegiatan rutin yang permanen dan terus-menerus, tujuannya untuk membiayai operasional kegiatan pemerintah dalam

pemberian layanan publik. Pengeluaran rutin pemerintah bersifat memenuhi kebutuhan internal kegiatan pemerintah sehingga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap/inventaris yang memberikan manfaat. Todaro (2000), belanja modal tujuannya untuk membiayai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik. Pengeluaran untuk *overhead* sosial dan ekonomi akan membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan pada gilirannya akan meningkatkan kapasitas perekonomian.

Sejalan dengan penjelasan di atas, aliran Keynesian menunjukkan bahwa pembelanjaan pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi. Pandangan ini mendorong peningkatan permintaan berbagai barang dan jasa yang diproduksi perekonomian secara agregat, sehingga mendorong pertumbuhan perekonomian. Jadi, pengeluaran pemerintah dipandang sebagai kekuatan eksogenus yang mengubah output agregat. Dengan kata lain, dalam kasus ini pertumbuhan ekonomi merupakan fungsi dari pengeluaran pemerintah.

Rosen (2008) melakukan pengukuran mengenai peranan pemerintah melalui pendekatan volume pengeluaran pemerintah dalam bentuk : i) pembelian barang-barang dan jasa-jasa, ii) transfer pendapatan kepada penduduk, perusahaan dan pemerintah, iii) *interest payment*. Pendekatan ini memberikan gambaran bahwa peranan pengeluaran pemerintah sangat penting terhadap perekonomian untuk penyediaan barang-barang publik. Tidak itu saja, pengeluaran pemerintah juga sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Uraian mengenai hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi diawali oleh Keynes pada era tahun 1930-an, kemudian berkembang pesat setelah munculnya model pertumbuhan endogenous. Berkaitan dengan kebijakan pemerintah model pertumbuhan endogen menyatakan bahwa kebijakan fiskal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika kebijakan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi kuantitas maupun kualitas persediaan modal, misalnya peningkatan investasi pemerintah dalam bidang infrastruktur, investasi dalam bidang pengembangan sumber daya manusia dan investasi dalam *Research and Development* (Romer, 2006).

Meskipun dalam kasus tertentu pengeluaran pemerintah untuk penyediaan barang publik seringkali menimbulkan perdebatan. Tapi secara umum pengeluaran pemerintah memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi sebagaimana dijelaskan di atas, meskipun fakta menunjukkan bahwa hubungan keduanya tidak ada yang konsisten, bisa positif dan negatif. Untuk kasus Indonesia salah satunya dilakukan oleh Sodik (2007) dengan menganalisis hubungan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi regional dengan menggunakan data panel. Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Hal ini mempertegas bahwa keterlibatan pemerintah dalam alokasi sumber daya dimaksudkan untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber-sumber ekonomi yang efisien, sebab dalam pengadaan barang publik tidak dapat dicapai melalui mekanisme pasar. Weber dan Niskanen dalam Archam (2012) menyatakan fungsi *utilities* dari pemerintah adalah berkaitan dengan besarnya anggaran, oleh karena itu pemerintah harus memaksimumkan anggaran yang merupakan kebijakan pemerintah.

Variabel Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan

Dalam teori ekonomi makro (Boediono, 1999) pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. Belanja barang dan jasa digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan untuk pengadaan

barang dan jasa, dan biaya pemeliharaan aset negara. Demikian juga sebaliknya sering diklasifikasikan sebagai pengeluaran pembangunan.

2. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.
3. Pengeluaran pemerintah untuk *transfer payment*.

Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah di pasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi (Afzal, 2002), misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis *transfer payment* mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan (Suparmoko, 1987).

Berkaitan dengan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota disebutkan bahwa anggaran sektor pendidikan di kabupaten/kota adalah anggaran belanja yang digunakan untuk memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan urusan wajib pemerintah daerah kabupaten/kota.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan dan Rancangan Desain Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk pemodelan ekonometrika dengan menggunakan persamaan simultan. Model persamaan simultan digunakan karena hubungan variabel tidak hanya bersifat satu arah namun bersifat saling mempengaruhi (dua arah). Dalam pemodelan tersebut digunakan data sekunder dengan bentuk panel data (*pooled data*) yang merupakan kombinasi data runtun waktu (*time series*) dan data silang tempat (*cross section*). Untuk estimasi data empiris setiap variabel diolah dengan menggunakan Microsoft Excel dan estimasi hubungan antara variabel diolah dengan SPSS versi 20.

Lokasi Penelitian

Unit analisis dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan sebanyak 23 kabupaten dari 24 kabupaten/kota, dengan waktu selama 10 tahun (2006-2015). Pengambilan waktu 10 tahun (2006-2015) dengan pertimbangan selama rentan waktu tersebut adalah pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah dan kebijakan tentang Belanja Operasional Sekolah (BOS) pada sektor pendidikan. Oleh karena itu sampel penelitian ini sebanyak 23 kabupaten dengan waktu pengamatan selama 10 tahun.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan melakukan pendekatan mengestimasi model pengeluaran pemerintah, model *outcome* layanan pendidikan, dan model serapan tenaga kerja serta model variabel sosial ekonomi menggunakan data panel (*pooled data*), yaitu gabungan antara data lintas waktu (*time-series data*) dan lintas ruang (*cross-section data*) 23 daerah Kabupaten/Kota di propinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2006-2015. Untuk pengujian terhadap hipotesis yang diajukan maka digunakan SPSS Versi 20.

Model Analisis

1. Panel Data

Model regresi panel data yaitu kombinasi data runtun waktu (*time series*) dan data silang (*cross-section*). Data runtun waktu meliputi satu obyek, tetapi meliputi beberapa waktu, dan data silang terdiri atas beberapa obyek atau banyak obyek (Winarno, 2009). Analisis panel data dalam penelitian menggunakan pendekatan koefisien tetap antar waktu dan individu (Common Effect), Menurut Widarjono (2013), dimana dalam pendekatan tersebut menggunakan teknik mengestimasi panel data hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* tanpa melihat perbedaan waktu dan individu dan menggunakan OLS (*Ordinary Least Square*).

2. Persamaan Simultan

Selain estimasi model dengan menggunakan persamaan tunggal, dengan membandingkan estimasi model pendekatan dilihat dari berbagai sudut pandang, maka ada alternatif lain yaitu pendekatan simultan. Model persamaan simultan dimana ada lebih dari satu persamaan regresi dan masing-masing persamaan regresi dan masing-masing persamaan memiliki variabel yang saling tergantung.

Persamaan I : $RLS_{it} = \beta_0 + \beta_1 B.Gaji_{it} + \beta_2 BBJ\&MODAL_{it} + \beta_3 B.OP_{it} + e_{1it}$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Belanja Pendidikan

Perkembangan keseluruhan belanja pemerintah sektor pendidikan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan 10 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.

Total Belanja Pendidikan Pemerintah 23 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan

No	Kabupaten/Kota	Tahun (Rp/milyar)										Rata-Rata Pertumbuhan % (2004-2013)
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	SELAYAR	31,725	37,098	43,394	50,773	63,901	84,984	82,829	134,809	135,390	139,707	9%
2	BULUKUMBA	90,980	100,775	111,642	123,700	357,181	198,666	238,144	226,847	161,503	194,708	6%
3	BANTAENG	38,878	46,577	55,920	67,276	82,255	158,537	200,535	250,232	281,267	297,450	10%
4	JENEPONTO	76,781	88,555	102,165	117,900	143,609	159,553	210,380	283,314	236,161	308,419	8%
5	TAKALAR	72,116	85,042	100,328	118,410	150,367	168,058	191,813	266,931	307,098	302,454	8%
6	GOWA	110,878	130,445	153,465	180,547	228,894	277,006	317,351	443,792	380,500	467,038	8%
7	SINJAI	38,878	46,577	55,920	67,276	82,255	158,537	200,535	250,232	281,267	297,450	10%
8	MAROS	84,888	91,278	98,148	105,536	137,534	172,004	168,192	255,062	303,567	245,614	7%
9	PANGKEP	75,721	89,823	106,575	126,478	184,092	206,134	254,049	324,801	337,849	383,480	9%
10	BARRU	52,425	60,959	70,883	82,422	108,165	164,869	154,212	198,916	162,436	189,186	8%
11	BONE	87,120	99,000	112,500	127,841	77,086	197,110	213,409	492,808	359,799	342,922	8%
12	SOPPENG	36,941	46,328	58,120	72,940	97,092	134,646	156,651	248,846	266,114	315,279	10%
13	WAJO	53,461	62,540	73,180	85,655	112,093	176,512	176,548	256,043	302,473	231,601	9%
14	SIDRAP	72,537	83,376	95,834	110,154	141,602	187,090	181,845	238,392	283,003	273,931	8%
15	PINRANG	75,137	91,405	111,375	135,916	165,205	193,028	233,218	336,146	297,101	373,736	9%
16	ENREKANG	56,897	72,838	93,325	119,671	121,192	150,395	169,506	237,640	262,700	215,963	8%
17	LUWU	58,562	70,556	85,008	102,419	103,173	172,505	201,523	307,690	256,682	303,732	9%
18	TATOR	75,847	81,556	87,695	94,296	142,218	111,979	100,615	185,136	194,125	203,159	7%
19	LUWU UTARA	77,834	88,447	100,508	114,214	140,175	138,058	159,777	267,370	257,861	243,920	8%
20	LUWU TIMUR	48,581	58,315	70,056	84,229	150,158	156,318	135,928	190,590	195,322	208,890	9%
21	MAKASSAR	258,695	272,310	286,642	301,729	388,432	456,198	541,649	855,484	398,090	607,949	6%
22	PARE-PARE	66,210	78,440	93,025	110,438	99,126	127,975	135,298	228,432	206,639	231,551	8%
23	PALOLO	43,955	51,771	61,097	72,235	101,820	107,210	131,680	178,569	169,843	208,122	9%

Sumber : APBD Kabupaten/kota Sulawesi Selatan, diolah 2015

Apabila dilihat dari perkembangan belanja pemerintah sektor pendidikan pada masing-masing kabupaten/kota selama 10 tahun terakhir secara keseluruhan mengalami peningkatan antara 90 %-100 %. Hal tersebut menggambarkan bahwa kebijakan pemerintah tentang peningkatan sektor pendidikan mendapat perhatian yang cukup serius baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Besarnya presentase belanja sektor pendidikan tidak selalu menggembirakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Apabila kita kaji lebih lanjut, ternyata belanja pendidikan yang besar tersebut lebih banyak dihabiskan untuk belanja pegawai. Padahal untuk meningkatkan mutu pendidikan, seharusnya proporsi antara belanja pegawai dan belanja operasional dan modal tidak terlalu timpang.

Capaian Kinerja Pendidikan

Pada dimensi rata-rata lama sekolah yang telah dicapai pada penduduk usia 15 tahun ke atas di kabupaten/kota Sulawesi Selatan selama 10 tahun terakhir tidak banyak mengalami perubahan, seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.
Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten/Kota
di Sulawesi Selatan Selama 10 Tahun Terakhir

No	Kabupaten/Kota	Tahun (Thn/Lama Sekolah)										Rata-Rata Pertumbuhan % (2004-2013)
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	SELAYAR	5.92	5.49	6.24	6.62	6.62	6.75	6.95	7.07	7.26	7.26	2%
2	BULUKUMBA	6.09	6.21	6.28	6.45	6.45	6.69	6.97	7.11	7.11	7.17	2%
3	BANTAENG	5.6	5.77	5.8	5.8	5.8	5.8	5.9	6.1	6.4	6.4	1%
4	JENEPONTO	5.1	5.3	5.8	5.8	5.8	5.8	6.2	6.2	6.2	6.2	2%
5	TAKALAR	5.2	5.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.4	6.4	6.9	7	3%
6	GOWA	6.1	6.2	6.3	6.3	6.3	6.5	6.4	7.2	7.2	7.3	2%
7	SINJAI	6.4	6.5	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	7	7	7.1	1%
8	MAROS	5.7	6	6.2	6.4	6.5	6.5	6.6	6.9	7	7.2	2%
9	PANGKEP	6	6.2	6.2	6.5	6.5	6.5	6.6	6.7	7	7.2	1%
10	BARRU	6.7	6.8	7.1	7.1	7.1	7.3	7.6	7.6	7.8	7.8	1%
11	BONE	5.6	5.6	6.2	6.2	6.2	6.3	6.7	6.7	6.7	6.7	2%
12	SOPPENG	6.2	6.4	6.5	6.8	5.8	6.9	7.2	7.2	7.2	7.3	1%
13	WAJO	5.6	5.8	5.8	5.8	5.8	6	6.2	6.5	6.6	6.9	2%
14	SIDRAP	7	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	0%
15	PINRANG	6.7	6.9	6.8	6.8	6.8	7.2	7.6	7.6	7.8	7.8	1%
16	ENREKANG	7	7.2	7.4	8.1	8.1	8.2	8.3	8.4	8.3	6.6	1%
17	LUWU	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9	1%
18	TATOR	7.5	7.1	7.3	7.4	7.4	7.4	7.7	7.7	7.8	8.2	4%
19	LUWU UTARA	6.9	7	7	7	7	7	7.4	7.4	7.4	7.5	1%
20	LUWU TIMUR	6.7	6.9	7.3	7.4	7.4	7.7	8.1	8.1	8.1	8.2	2%
21	MAKASSAR	10.2	10.4	10.5	10.5	10.5	10.6	10.8	10.8	10.8	10.9	1%
22	PARE-PARE	7.8	7.8	8.7	8.9	9.3	9.4	9.4	9.6	9.8	9.9	2%
23	PALOLO	8.9	9.1	9.1	9.1	9.6	9.6	9.7	10	10.1	10.1	1%

Sumber : BPS Sulawesi Selatan, diolah 2015

Tabel di atas mengindikasikan bahwa selama 10 tahun terakhir perubahan tingkat pendidikan yang diukur dari rata-rata lama sekolah pada 23 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan belum mencapai target nasional yaitu pendidikan dasar tuntas 9 tahun yang dilanjutkan pada pendidikan dasar tuntas 12 tahun atau setingkat sekolah lanjutan (SMA).

Pengaruh Pertumbuhan Belanja Sektor Pendidikan Terhadap Capaian Rata-Rata Lama Sekolah

Untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah sektor pendidikan terhadap capaian kinerja pendidikan antar daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, dimana kinerja pendidikan diproksi dengan menggunakan rata-rata lama sekolah akan digunakan model sebagai berikut :

Persamaan I :

$$RLS_{it} = \beta_0 + \beta_1 Bg_{it} + \beta_2 BBJM + \beta_3 Bops + e_{1it}$$

Berdasarkan hasil estimasi model tersebut di atas, yang menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model* dengan metode SUR, nampak bahwa belanja pemerintah sektor pendidikan yang diproksi dengan 3 (tiga) variabel yakni Belanja Gaji (Bgj), Belanja Barang, Jasa dan Modal (BBJM) dan Belanja Operasional (Bops) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Rata-Rata Lama sekolah (RLS). Perbandingan Nilai koefisien estimasi model belanja pemerintah sektor pendidikan pada 23 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.

Hasil Estimasi Model Outcome Pendidikan Persamaan I

Variabel Independen	TH	Koefisien (□)	t-Test	Sig.	VIP
Belanja Barang, Jasa dan Modal Belanja Operasional	+	0,532*	3.658	0.000	1.734
	+	-0,350**	-2.47	0.014	1.350
	+	0,344**	2.576	0.011	1.909
Constant		-5.927	-1.744		
R ²	0.406				
Adjusted R ²	0.157				
F Hitung	14.879				
DW	2,242				
N	230				

Sumber : Analisis data sekunder setelah diolah, 2015

Keterangan :

*) Signifikan pada taraf signifikansi 0.01 atau 99 %.

**) Signifikan pada taraf signifikansi 0.05 atau 95 %.

***) Signifikan pada taraf signifikansi 0.10 atau 90 %.

Dari nilai hasil pengolahan data berdasarkan tabel, selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam persamaan model persamaan sebagai berikut :

$$RLS = 5.927 + 0.532 \text{ Bgj} - 0.350 \text{ BBJM} + 0.344 \text{ BOps}$$

$$T_{\text{stat}} = (3.6558) (-2,470) (2.576)$$

$$R^2 = 0.406 \text{ Adj } R^2 = 0.154 \text{ SE} = 3.398 \text{ DW-Stat} = 2.242$$

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah belanja sektor pendidikan selama 10 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan atau rata-rata pertumbuhannya 4-5 % pertahun.
2. Pertumbuhan capaian kinerja pendidikan pada Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Sulawesi Selatan selama 10 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Namun pertumbuhannya hanya mencapai 2 %-3 % pada setiap Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Capaian kinerja pendidikan pada Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) tersebut baru mencapai 7.6 tahun atau pada tingkatan kelas 2 SMP.
3. Peningkatan porsi belanja sektor pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan capaian kinerja pendidikan yang diproksi dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).

DAFTAR PUSTAKA

Afzalet. 2002. *Relationship among Education, Poverty and Economic Growth in Pakistan : An Econometric Analysis*. Journal of Elementary Education . Vol. 22, No. 1 pp. 23-45.

- Alam, Syamsul. 2014. *Analisis Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Sulawesi Selatan*. Thesis Universitas Hasanuddin (Unhas).
- Amir, Archam. 2013. *Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Pergeseran Sektoral dan Pola Ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Sulawesi dan Jawa (2011)*. Disertasi Bandung Pascasarjana Unpad.
- Anwar, Sanusi. 1998. *Pengaruh Alokasi Sumber Dana terhadap Perubahan Struktur Produksi dan Distribusi Pendapatan antar daerah di Indonesia*. Disertasi. Bandung Pascasarjana Unpad.
- Baltagi. Badi H. 2001. *Econometric Analysis of Panel Data*, England : John Wiley & Sons.
- Bappenas. 2012. *Pembangunan Daerah Dalam Angka 2012*. Kementerian Perencanaan Nasional.
- Barr. Nicholas. 2002. *The Benefit of Education What We Know and What We Don't*, London School of Economics.
- Bado, Basri. 2015. *Pengaruh Belanja Sektor Pendidikan terhadap Outcome Pendidikan dan Dampaknya terhadap Sosial Ekonomi Sulawesi Selatan*. Disertasi PPS UNM, 2015. Tidak dipublish.
- Basri, dkk. (2015). *Analysis the Influence of Average Length of School and Education Level of Workers against Poverty in South Sulawesi*. International Journal of Applied Business and Economic Research (IJABER) Vol.13, Issue 2 p 551-559.
- Becker Gary S., *Investment in Human Capital : A Theoretical Analysis*. The Journal of Political Economy, Volume 70, Issue 5, Part 2 : Investment in Human Being (Oct, 1962), 9-49.
- Boediono. 2009. *Ekonomi Indonesia, Mau ke Mana : Kumpulan Esai Ekonomi*. Jakarta : Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Boediono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta. BPFE.
- Danacica, et. Al. (2010). *The Interactive Causality Between Higher Education And Economic Growth In Romania*. International Review of Business Research Paper. 4(6), 491–500.
- Datt, G. and M. Ravallion. 1992. *Growth and Redistribution Components of Changes in Poverty Measures*, Journal of Development Economics 38 (2) : 275-295.
- Dede, Rosyada. 2013. *Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan di Indonesia*. Makalah disampaikan pada lokakarya ISPI Jawa Barat 12 Agustus 2013.
- Duma, Nombulelo. 2007. *Sri Lanka's Sources of Growth*. IMF Working Paper No. wp/07/255.
- Erum Khushnood Zahid Shaikh, dkk. (2014). *Empirical Impact of Population, Poverty and Public Education Expenditure on Literacy Rate in Pakistan*. www.case studiesjournal.com Volume 4, Issue 1.
- Fadiya, B, B. Volume 15 No. 4. 2010. *Determinants Of Educational Outcomes in Nigeria (1975-2008)*. European Journal of Social Science.
- Faith E. Crampton. Vol 47. No. 3 pp. 305-332, 2009. *Spending on School Infrastructure : Does Money Matter?* Journal of Administration.
- Fattah, Sanusi. 2005. *Pengaruh Pertumbuhan Tingkat Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan antara Daerah di Indonesia Periode 1987-2003*. Disertasi Unpad Bandung.
- Ferreira. Fransisco H. G. and Ricardos Paez d Barros. 2000. *Education and Income Distribution in Urba Brazil, 1976-1996*. CEPAL, Review.

- Hanjar Giri Anggraini. 2014. *Analisis Output dan Outcome Bidang Pendidikan Dalam Era Otonomi Daerah di Jawa Tengah*, Jurnal Pendidikan Ekonomi : Dinamika Pendidikan Vol. IX, No. 1, Juni 2014 Hal. 70-82.
- Mawardi, Agus. 2010. *Hubungan Anggaran Belanja Pendidikan dengan Angka Partisipasi Sekolah : Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten-Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah*, Tesis FE UGM (tidak dipublikasikan).
- Mughal, Waris Hameed. 2007. *Human Capital Investment and Poverty Reduction Strategy in Pakistan*. Asia Pacific Press.
- Musgrave, Richard A., and Peggy B. Musgrave. 1989. *Public Finance in Theory and Practice*, 5th edt.
- Parwoto. 2001. *Makalah Penanggulangan Kemiskinan*, Unpublished, Departemen Permukiman dan Pembangunan Sarana Wilayah, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang *Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang *Pendanaan*.
- Uzuchukow Amakom, Vol. 5 No. 12 Desember 2010. *Distributional Impact of Public Expenditure on Education and Healthcare in Nigeria : A Gender Based Welfare Dominance Analysis*. International Journal of Business and Management.
- Widyastuti, Astriana. 2012. *Analisis Hubungan antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009*. Economics Development Analysis Journal, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>